

# Pemetaan IT Process untuk Mengukur Layanan Teknologi Informasi Pada Instansi Pemerintah Menggunakan COBIT-5 (Studi Kasus pada Balai Diklat Keuangan Palembang)

Iwan Khrisnawan

Program Studi Magister Manajemen Sistem Informasi  
Universitas Gunadarma  
Jl. Margonda Raya No. 100, Pondok Cina, Beji, Depok 16424  
Email : iwankhrisnawan@gmail.com

## Abstrak

Untuk menunjang visi Kementerian Keuangan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad 21, Kementerian Keuangan membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, inovatif, kompeten dan mampu menghadapi era disrupsi Revolusi Industri 4.0. Balai Diklat Keuangan Palembang (BDK Palembang) adalah Unit Pelayanan Teknis yang berada dibawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan yang melaksanakan pengembangan kompetensi SDM Kementerian Keuangan di wilayah kerjanya yang meliputi Propinsi Sumatera Selatan, Lampung dan Bangka Belitung. Dengan semakin besarnya jumlah peserta dan pelatihan yang dilakukan oleh BDK Palembang akan berdampak semakin tingginya ketergantungan penggunaan TI dan resiko dalam pengelolaan TI. Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan TI yang telah dilakukan oleh BDK Palembang, maka perlu dilakukan evaluasi dengan menggunakan metoda yang tepat sehingga dapat mengukur kondisi pengelolaan TI saat ini dan selanjutnya dapat dilakukan improvement di masa yang akan datang. Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua sumber data yakni data primer yang didapat dari wawancara dan kuesioner serta data sekunder dari studi literatur. Dalam tahap pertama penelitian dilakukan *Initiate Program* untuk mengetahui dan mengenal organisasi dan tahap kedua adalah *Define Problem* dan *Initiation* yang hasilnya berupa 16 proses hasil pemetaan IT *Related Goals*.

**Kata Kunci:** BDK Palembang, COBIT 5, IT Process, Layanan TI, Pengelolaan TI

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reformasi Nasional yang bermula dari krisis ekonomi pada tahun 1998. Bagi Kementerian Keuangan, Reformasi Birokrasi dimulai sejak tahun 2002 dengan dikeluarkannya Paket UU Keuangan Negara dan pemisahan fungsi penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta modernisasi administrasi perpajakan tahap I.

Dengan semakin cepatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian Keuangan telah memasukkan aspek digitalisasi dalam periode V Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan. Transformasi Digital Kementerian Keuangan yang dimulai pada tahun 2019 diharap-

kan dapat menyempurnakan proses bisnis dalam memberikan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat dan mendorong efisiensi proses bisnis di Kementerian Keuangan.

Untuk menunjang visi Kementerian Keuangan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad 21, Kementerian Keuangan membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, inovatif, kompeten dan mampu menghadapi era disrupsi Revolusi Industri 4.0. Kemenkeu menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga terampil tersebut. BPPK telah menerapkan strategi *Kemenkeu Corporate University* untuk mendukung SDM Kemenkeu yang handal, kompeten dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya BPPK

membutuhkan teknologi dan proses bisnis yang aplikatif, adaptif dan mudah diakses.

BPPK sudah menggunakan teknologi informasi untuk mendukung proses layanan utamanya yakni penyelenggaraan pelatihan. Penggunaan teknologi informasi sudah banyak membantu dalam menunjang pelaksanaan tugas organisasi, namun beberapa keluhan diantaranya adalah penggunaan aplikasi yang belum sepenuhnya mempermudah proses dukungan bisnis, dan proses pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang terpusat membuat prioritas pemenuhan kebutuhan menjadi tidak bisa segera dapat dipenuhi.

BDK Palembang sebagai unit pelaksana teknis dibawah BPPK ikut melaksanakan pengembangan kompetensi SDM Kementerian Keuangan di wilayah kerjanya yang meliputi Propinsi Sumatera Selatan, Lampung dan Bangka Belitung. Jumlah peserta dan program diklat yang diselenggarakan oleh BDK Palembang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Dengan semakin meningkatnya jumlah peserta dan pelatihan yang dilakukan oleh BDK Palembang akan berdampak semakin tingginya ketergantungan penggunaan TI dan resiko dalam pengelolaan TI.

Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan TI yang telah dilakukan oleh BDK Palembang, maka perlu dilakukan pengukuran dengan menggunakan metode yang tepat sehingga dapat diketahui kesenjangan antara harapan dan keinginan serta memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan TI. Salah satu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengukur kapabilitas tata kelola TI adalah COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*) yang merupakan standar untuk tata kelola TI (*IT governance*) dan dikembangkan oleh ISACA (*Information System and Control Association*).

## Telaah Pustaka

### Tata Kelola Teknologi Informasi

Menurut Alter teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan dan mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data [1]. Lucas secara umum menjelaskan teknologi informasi sebagai segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik [2]. Sementara itu Sanyoto Gondodiyoto menyatakan bahwa Tata Kelola TI merupakan salah satu bagian terpenting dari kesuksesan penerapan *good corporate governance* [3]. Tata Kelola TI memastikan pengukuran efektifitas dan efisiensi peningkatan proses bisnis perusahaan melalui struktur yang terkait dengan TI menuju ke arah tujuan strategis perusahaan.

### Tata Kelola TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan menyadari dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi maka diperlukan sebuah panduan umum mengenai tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Panduan ini harus selaras dengan Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.

Menteri Keuangan telah mengeluarkan peraturan PMK 97/PMK.01/2017 mengenai Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang terpercaya dan berkualitas [4]. Peraturan tersebut secara garis besar mengatur mengenai hal sebagai berikut:

- Prinsip Organisasi dan Manajemen Data
- Sistem Informasi
- Teknologi
- Keamanan Informasi
- Pengendalian dan Pengawasan

### Penelitian sebelumnya

Penelitian dengan menggunakan COBIT 5 sudah banyak dilakukan, antara lain dilakukan oleh Amhar Amri Devantara yang menggunakan COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Hasil dari penelitian menunjukkan sebagian besar proses masih berada di Level 0 dan sebagian kecil di level 1 [5].

Mega Putri Islamiah melakukan penelitian tentang tata kelola teknologi informasi pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari penelitian didapatkan tingkat pengelolaan pada proses APO 02, APO 06 dan APO 09 adalah berada pada level 1 [6].

Fahmi Ajismanto melakukan analisa domain proses pada sistem informasi *Worksheet* pada Politeknik Palcomtech dengan menggunakan COBIT 5. Sebagian besar proses yang dinilai berada di level 3 dan 4 [7].

Gamal Febri N, Selo, Eko Nugroho, 2017 melakukan penelitian mengenai pemetaan tujuan kaskade COBIT 5 pada pengelolaan layanan teknologi informasi di instansi pemerintah. Objek yang menjadi subjek penelitian adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dari hasil penelitian didapatkan 7 (tujuh) proses yang akan diukur kapabilitas tatakemelanya [8].

Penelitian yang dilakukan oleh Susan Sandra Indriati mengenai evaluasi tata kelola TI dengan objek penelitian pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Dari hasil penelitian didapatkan hasil evaluasi bahwa proses

terkait tata kelola teknologi informasi yang relevan dengan permasalahan di lingkungan organisasi sebagian besar masih berada pada level 0 (*incomplete*) dan sebagian kecil sudah berada di level 1 (*performed*) [9].

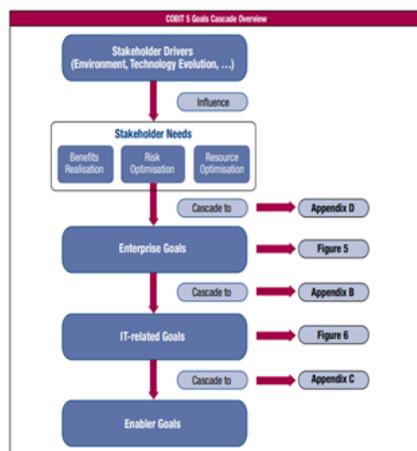
## Metode Penelitian

### COBIT 5

*Control Objectives for Information and related Technology* (COBIT) adalah suatu kerangka dan standar tata kelola TI yang juga merupakan sekumpulan pengukuran alat bantu yang dapat menjembatani kesenjangan (*gap*) antara kebutuhan pengendalian, masalah teknis dan risiko bisnis, dan mengkomunikasikan tingkat pengendalian tersebut kepada *stakeholder* (ITGI, 2007). COBIT 5 menyediakan model pengukuran untuk mengetahui kapabilitas dari setiap proses yang dijalankan. COBIT 5 memiliki 5 prinsip yakni [10]:

#### 1. Meeting stakeholder needs

Setiap *stakeholder* memiliki tujuan yang berbeda-beda. *Stakeholder* organisasi memiliki kebutuhan akan keberadaan sistem dan teknologi informasi dalam konteks yang beragam.



Gambar 1: COBIT 5 Goals Cascade

Keberadaan teknologi informasi tidak boleh lepas dari konteks kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Perusahaan menciptakan nilai bagi *stakeholder* mereka dengan mempertahankan keseimbangan antara realisasi manfaat dan optimalisasi risiko serta penggunaan sumber daya.

Untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* maka diperlukan suatu alur tujuan. Alur tujuan COBIT 5 seperti yang dijelaskan pada Gambar 1 adalah sistem yang menerjemahkan keinginan dari *stakeholder* kedalam tujuan yang lebih spesifik untuk mendukung pe-

menuhan kebutuhan organisasi dan layanan TI.

#### 2. Covering Enterprise End to End

Prinsip ini menjelaskan COBIT 5 mengintegrasikan tata kelola TI (*IT Governance*) dengan tata kelola organisasi (*Enterprise Governance*). COBIT 5 tidak hanya fokus kepada pengelolaan fungsi TI namun juga menganggap TI sebagai asset yang penting dan harus dilindungi seperti halnya asset lain dalam organisasi. Oleh karena itulah maka domain *governance* harus diperhatikan sehingga pendekatan yang dipergunakan perlu utuh dan lengkap, di segala lini proses dan unit organisasi.

#### 3. Applying a Single Integrated Framework

Saat ini banyak standar *best practice* di bidang manajemen dan *governance* teknologi informasi yang dikenal di industri seperti: ISO-38500, TOGAF, ITIL, ISO-20000, ISO-27001, PMBOK, CMMI, dan lain sebagainya. COBIT telah mempertimbangkan dan mengadopsi berbagai kerangka dan konsep *best practice* tersebut ke dalam prinsip, model, dan strukturnya. Dapat dikatakan bahwa COBIT 5 secara lengkap dan terpadu mengintegrasikan keseluruhan kerangka *best practice* tersebut.

#### 4. Enabling a holistic approach

Tata kelola TI yang baik memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan komponen yang saling terkait. Tata kelola IT berkaitan dengan sejumlah komponen seperti: prosedur, kebijakan, proses, sumber daya, sosial dan lain sebagainya. Masing-masing domain ini mampu menjadi pemicu (*enabler*) bagi penyelenggaraan tata kelola IT yang baik. COBIT 5 memandang bahwa setiap *enabler* saling mempengaruhi satu sama lain dan menentukan apakah penerapan COBIT 5 akan berhasil.

#### 5. Separating governance from management

COBIT 5 membuat perbedaan yang jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai jenis kegiatan, memerlukan berbagai struktur organisasi dan melayani tujuan yang berbeda. Jika manajemen lebih menekankan pada rangkaian menjalankan aktivitas untuk pencapaian visi, misi, dan obyektif organisasi yang telah dicanangkan, *governance* lebih fokus pada cara-cara pencapaian visi, misi, dan obyektif tersebut yang sejalan dengan prinsip-prinsip nilai (*value*) yang dianut oleh *stakeholder*.

COBIT 5 memiliki 2 (dua) area kerja utama yang dipisahkan antara *management* dan *governance*.

Terdapat 5 (lima) domain utama dan 37 proses dalam COBIT 5 yaitu:

1. *Domain Evaluate, Direct and Monitor (EDM)*  
Terdiri dari 5 proses yakni EDM 01, EDM 02, EDM 03, EDM 04 dan EDM 05.
2. *Align, Plan, and Organize (APO)*  
Terdiri dari 13 proses yakni APO 01, APO 02, APO 03, APO 4, APO 5, APO 6, APO 7, APO 08, APO 09, APO 10, APO 11, APO 12 dan APO 13.
3. *Build, Acquire, and Implement (BAI)*  
Terdiri dari 10 proses yakni BAI 01, BAI 02, BAI 03, BAI 04, BAI 05, BAI 06, BAI 07, BAI 08, BAI 09 dan BAI 10.
4. *Deliver, Service, and Support (DSS)*  
Terdiri dari 6 proses yaitu DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04, DSS 05 dan DSS 06.
5. *Monitor, Evaluate, and Assess (MEA)*  
Terdiri dari 3 proses yakni MEA 01, MEA 02 dan MEA 03.

## Metode Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berasal dari kuesioner pengelola layanan TI pada BDK Palembang dan telaah pustaka. McMillan dan Schumacher menjelaskan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian [11].

## Implementasi tata kelola TI

Implementasi tata kelola COBIT 5 memiliki 7 (tujuh) tahapan [14]. Tahapan dalam penerapan tata kelola COBIT 5 sebagai berikut [12]:

1. Tahap I – *Initiate Programme*  
Menjelaskan tentang faktor apa yang mungkin menjadi penggerak suatu organisasi dan identifikasi terhadap faktor pendorong perubahan organisasi. Tujuan tahap ini adalah memperoleh pemahaman tentang organisasi, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi serta rencana strategis organisasi.
2. Tahap II – *Define Problems and Opportunities*  
Menjelaskan tentang posisi organisasi saat ini yang berhubungan dengan TI. Organisasi perlu mengetahui dukungan yang dimiliki saat ini dan kekurangannya. Tujuan tahap ini untuk menselaraskan tujuan TI dengan organisasi.

3. Tahap 3 – *Define Road Map*

Menjelaskan tentang rencana perbaikan yang akan dilakukan dan kesenjangan antara harapan dan kondisi organisasi saat ini. Tujuan tahap ini untuk menetapkan sasaran yang akan dilaksanakan.

4. Tahap 4 – *Plan Programmed*

Menjelaskan tentang apa yang harus dikerjakan oleh organisasi berupa pemecahan masalah, solusi dan rekomendasi perbaikan. Tujuan tahap ini memperbaiki kinerja sehingga dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.

5. Tahap 5 – *Execute Plan*

Menjelaskan pelaksanaan rencana kerja program pada organisasi dan pemantauan keseluruhan yang dicapai dengan kinerja.

6. Tahap 6 – *Release Benefits*

Menjelaskan tentang keuntungan berkelanjutan yang didapat oleh organisasi ketika sudah dilakukan perbaikan tata kelola TI organisasi.

7. Tahap 7 – *Review Effectiveness*

Menjelaskan tentang evaluasi dari setiap pencapaian tujuan dan identifikasi tata kelola untuk meningkatkan perbaikan terus menerus.

## Pembahasan

### Initiate Program

Untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan TI di BDK Palembang maka perlu memahami tugas pokok dan fungsi organisasi.

Misi Kementerian Keuangan adalah sebagai institusi yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan di abad 21. Dalam mewujudkan misinya Kementerian Keuangan memerlukan aparat keuangan yang terampil, ahli dan memiliki kemampuan analisa yang memadai. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat tuntutan pembangunan yang sedang giat dilakukan di Indonesia. Dengan jumlah pegawai Kemenkeu sampai dengan tanggal 01 Januari 2020 sebesar 82.451 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia dan tuntutan dinamika perkembangan global dan teknologi yang semakin cepat maka BPPK dituntut agar bisa menyesuaikan pengembangan kompetensi sumber daya manusianya

Wilayah kerja BDK Palembang meliputi tiga provinsi yakni Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melayani 9 Kantor Wilayah serta 71 Kantor Pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan. Dari Tabel 1 menjelaskan jumlah program dan peserta diklat di BDK Palembang yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1: Jumlah Program dan Peserta Diklat per 01 Januari 2019

No	Tahun	Jumlah Program	Jumlah Peserta
1.	2016	16	434
2.	2017	41	1139
3.	2018	51	1570

BDK Palembang merupakan unit pelaksana teknis BPPK yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPPK yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Struktur organisasi Balai Diklat Keuangan Palembang dijelaskan dalam Gambar 2.



Gambar 2: Struktur Organisasi BDK Palembang

## Define Problem and Opportunities

Tahap ini akan menjelaskan tentang posisi organisasi saat ini yang berhubungan dengan TI dengan menselaraskan tujuan TI dengan organisasi. Mekanisme untuk menerjemahkan keinginan dari *stakeholder* kedalam tujuan yang lebih spesifik, tujuan organisasi, tujuan terkait TI dan tujuan *enabler* membutuhkan suatu alur kerja yang disebut dengan COBIT 5 *Goals Cascade*.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam tahap ini, penulis menggunakan kuesioner dan diskusi / wawancara dengan kepala seksi/ subbagian atau pengelola layanan TI di BDK Palembang. Tahapan untuk mendapatkan *enabler* organisasi adalah sebagai berikut:

### Pemetaan Kebutuhan Organisasi dengan Tujuan Perusahaan

BPPK dan BDK Palembang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2015-2019 [16]. Renstra disusun dengan mempertimbangkan sumber daya, peluang dan tantangan dan dapat

diubah menyesuaikan dengan kondisi perubahan-perubahan penting yang berdampak signifikan. Sejalan dengan Renstra 2015-2019, sasaran yang akan dicapai BPPK adalah:

1. Terwujudnya pendidikan dan pelatihan yang berbasis penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat.
2. Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan.
3. Terwujudnya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya penataan organisasi BPPK yang handal dan modern.
5. Tercapainya peningkatan pemanfaatan TIK yang mendukung pendidikan dan pelatihan.
6. Penerapan manajemen pengembangan SDM dalam rangka mewujudkan SDM BPPK yang amanah, professional, berintegritas tinggi dan bertanggungjawab.
7. Terwujudnya akuntabilitas system manajemen keuangan dan manajemen asset.
8. Terwujudnya peningkatan jejaring kerjasama BPPK dengan institusi didalam maupun diluar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi.

Rencana strategis BPPK ini akan menjadi kebutuhan organisasi yang selanjutnya dilakukan pemetaan dengan *Governance and Management Questions* sesuai dengan Appendix D pada COBIT 5 *Goals Cascade* dan menghasilkan tujuan organisasi. Domain data Primer (P) menunjukkan sasaran yang paling dominan.

Dari hasil kuesioner yang disampaikan kepada pengelola TI BDK Palembang menunjukkan bahwa Rencana Strategis organisasi sudah merupakan tujuan perusahaan sesuai dengan *Government and Management Questions* pada COBIT 5. Penjelasan digambarkan pada Tabel 2.

### Pemetaan Tujuan Perusahaan – Tujuan Pemerintah

Pemetaan tujuan perusahaan ke dalam tujuan pemerintah memerlukan relasi. COBIT 5 mendefinisikan 17 *Goals Generic* yang dikembangkan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) dan menghubungkan tujuan perusahaan kedalam tujuan pemerintah. Penelitian ini ingin mendapatkan informasi apakah rencana strategis organisasi dapat tercapai dengan kondisi pengelolaan TI saat ini. Penjelasan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2: Tabel Pemetaan Kebutuhan Organisasi dalam Tujuan Perusahaan

Kebutuhan Organisasi	Nilai pemangku kepentingan dari investasi bisnis	Portofolio produk dan layanan yang kompetitif	Risiko bisnis yang dikelola (pengamanan aset)	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal	Transparansi keuangan	Budaya layanan berorientasi pelanggan	Kontinuitas dan ketersediaan Layanan Bisnis	Respon tangkas terhadap lingkungan bisnis yang berubah	Penandaan keputusan strategis berbasis informasi	Optimalisasi biaya pengiriman layanan	Optimalisasi fungsi proses bisnis	Optimalisasi biaya proses bisnis	Program perubahan bisnis yang dikelola	Produktivitas operasional dan staf	Kepatuhan dengan kebijakan internal	Orang-orang yang terampil dan termotivasi	Budaya inovasi produk dan bisnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis penelitian dan pemuktahiran data kebutuhan diklat	P	P			P	P	P		P								P
Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan	P	P				P	P	P	P	P				P	P	P	P
Terwujudnya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan						P	P	P	P			P	P		P		P
Terwujudnya penataan organisasi BPPK yang handal dan modern.					P	P	P	P	P		P			P	P		P
Tercapainya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan.	P	P	P			P	P	P		P	P	P		P	P	P	P
Penerapan manajemen pengembangan SDM dalam rangka mewujudkan SDM BPPK yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab.			P	P	P			P						P	P	P	
Terwujudnya akuntabilitas sistem manajemen keuangan dan manajemen aset.			P	P	P							P			P		
Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama BPPK dengan institusi di dalam maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi.							P	P								P	

Tabel 3: Penentuan Pemetaan Tujuan Perusahaan dengan Tujuan Pemerintah

Dimensi BSC	Tujuan Perusahaan	Tujuan Pemerintah		
		Benefits Realisation	Risk Optimisation	Resource Optimisation
Keuangan	Nilai pemangku kepentingan dari investasi bisnis	P	S	S
	Portofolio produk dan layanan yang kompetitif	P	S	S
	Risiko bisnis yang dikelola (pengamanan aset)	P	S	P
	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal	S	S	P
	Transparansi keuangan	P	P	P
Pelanggan	Budaya layanan berorientasi pelanggan	P	P	S
	Kontinuitas dan ketersediaan Layanan Bisnis	P	P	S
	Respon tangkas terhadap lingkungan bisnis yang berubah	P	P	P
	Penandaan keputusan strategis berbasis informasi	P	P	S
	Optimalisasi biaya pengiriman layanan	P	S	S
Internal	Optimalisasi fungsi proses bisnis	P	P	S
	Optimalisasi biaya proses bisnis	P	S	P
	Program perubahan bisnis yang dikelola	P	S	S
	Produktivitas operasional dan staf	P	P	P
	Kepatuhan dengan kebijakan internal	P	P	P
Pembelajaran dan Pertumbuhan	Orang-orang yang terampil dan termotivasi	P	P	P
	Budaya inovasi produk dan bisnis	P	P	S

Tujuan pemerintah terdiri dari manfaat utama (*benefits realisation*), optimasi resiko (*risk optimization*) dan optimasi sumber daya (*resource optimization*). Hasil pembagian tujuan organ-

isasi dipetakan dengan tujuan perusahaan, dengan melalui observasi peneliti selama bertugas dan hasilnya dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4: . Pembagian Tujuan Pemerintah dalam COBIT 5

Benefits Realisation	Risk Optimisation	Resource Optimisation
Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat.	Terwujudnya penataan organisasi BPPK yang handal dan modern.	Penerapan manajemen pengembangan SDM dalam rangka mewujudkan SDM BPPK yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab.
Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan.	Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama BPPK dengan institusi di dalam maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi.	Terwujudnya akuntabilitas sistem manajemen keuangan dan manajemen aset.
Terwujudnya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan.		
Tercapainya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan.		

Tabel 5: Hasil Pemetaan Tujuan Perusahaan – Tujuan IT

Tujuan IT			Tujuan Perusahaan													
			Budaya layanan berorientasi pelanggan	Kontinuitas dan ketersediaan Layanan Bisnis	Respon tangkas terhadap lingkungan bisnis yang berubah	Penandaan keputusan strategis berbasis informasi	Optimalisasi biaya pengiriman layanan	Optimalisasi fungsi proses bisnis	Optimalisasi biaya proses bisnis	Program perubahan bisnis yang dikelola	Produktivitas operasional dan staf	Kepatuhan dengan kebijakan internal	Orang-orang yang terampil dan termotivasi	Budaya inovasi produk dan bisnis		
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Pelanggan	7	Pengiriman layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
	8	Penggunaan aplikasi, informasi, dan solusi teknologi yang memadai	P	P	P	P	P	P	P	P	S	P	P	P		
Internal	9	IT agility	P	P	P	P	P	P	S	P	S	S	P	P		
	10	Keamanan informasi, infrastruktur pemrosesan dan aplikasi	P	P	P	P	P	P	S	P	P	P	P	P		
	11	Optimalisasi aset, sumber daya, dan kemampuan TI	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	S		
	12	Pemberdayaan dan dukungan proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi ke dalam proses bisnis	P	P	P	P	S	P	S	P	S	S	S	S		
	13	Penyampaian program memberikan manfaat, tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi persyaratan serta standar kualitas	P	P	P	P	S	P	P	S	S	P	S	P		
	14	Ketersediaan informasi yang andal dan berguna untuk pengambilan keputusan	P	P	P	P	P	P	S	P	S	S	S	P		
	15	Kepatuhan TI dengan kebijakan internal	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P		

**Pemetaan Tujuan Perusahaan – Tujuan IT**

Dari pemetaan sebelumnya didapatkan data bahwa Tujuan Perusahaan pada domain *Benefit Realisation* hanya 1 (satu) pada dimensi BSC yang menunjukkan hasil *Secondary* (S). Tujuan perusahaan selanjutnya akan dipetakan dengan tujuan IT.

COBIT 5 telah mendefinisikan 17 Tujuan IT. Data dalam pemetaan ini menggunakan kuesioner

yang berasal dari pengelola layanan TI pada BDK Palembang. Perspektif yang dipilih adalah *Customer* dan *Internal*.

Pemilihan perpektif ini berdasarkan hasil observasi penulis selama bertugas di BDK Palembang. Hasil pemetaan tujuan perusahaan ke tujuan IT ditampilkan dalam Tabel 5.

**Pemetaan Tujuan IT – Proses IT**

Pemetaan selanjutnya adalah memetakan tujuan IT yang sudah terpilih ke dalam 37 proses COBIT 5.

Tujuan IT yang terpilih adalah yang mendapatkan nilai *Secondary* (S) karena penelitian ingin mendapatkan titik lemah dalam pengelolaan IT pada BDK Palembang.

Tabel 6: Hasil Pemetaan Tujuan IT – Proses IT

COBIT 5 Process			Tujuan IT						
			Penggunaan aplikasi, informasi, dan solusi teknologi yang memadai IT Agility Pembedayaan dan dukungan proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi ke dalam proses bisnis Penyampaian program memberikan manfaat tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi persyaratan serta standar kualitas Ketersediaan informasi yang andal dan berguna untuk pengambilan keputusan Kepatuhan TI dengan kebijakan internal						
			08	09	12	13	14	15	
Evaluate, Direct and Monitor	EDM 01	Menjamin Pengaturan dan Pemeliharaan Kerangka Kerja Tata Kelola		P			P		
	EDM 02	Menjamin Pencapaian Manfaat	P		P	P			
	EDM 03	Menjamin Optimasi Resiko				P			
	EDM 04	Menjamin Optimasi Sumber Daya				P	P		
	EDM 05	Menjamin Keterbukaan Kepentingan							P
Align, Plan and Organize	APO 01	Mengelola Kerangka Kerja Manajemen TI							
	APO 02	Mengelola Strategi	P		P	P			
	APO 03	Mengelola Enterprise Architecture	P					P	
	APO 04	Mengelola Inovasi							
	APO 05	Mengelola Portfolio							
	APO 06	Mengelola Anggaran dan Biaya							
	APO 07	Mengelola Sumber Daya Manusia							
	APO 08	Mengelola Hubungan							
	APO 09	Mengelola Perjanjian Layanan	P						P
	APO 10	Mengelola Penyedia							
	APO 11	Mengelola Kualitas			P	P	P	P	P
	APO 12	Mengelola Resiko		P					P
	APO 13	Mengelola Keamanan	P	P					P
Build, Acquire and Implement	BAI 01	Mengelola Program dan Proyek							
	BAI 02	Mengelola Persyaratan							
	BAI 03	Mengelola Identifikasi dan Pembangunan Solusi			P	P			
	BAI 04	Mengelola Ketersediaan dan Fasilitas			P	P			
	BAI 05	Mengelola Pembedayaan Perubahan Organisasi		P					
	BAI 06	Mengelola Perubahan		P					
	BAI 07	Mengelola Perubahan Penerimaan dan Transisi							
	BAI 08	Mengelola Pengetahuan							
	BAI 09	Mengelola Asset		P		P			
	BAI 10	Mengelola Konfigurasi							
Deliver Support and Service	DSS 01	Mengelola Operasi							
	DSS 02	Mengelola Permintaan Layanan dan Insiden	P		P	P			
	DSS 03	Mengelola Masalah	P		P	P			
	DSS 04	Mengelola Keberlanjutan		P	P				
	DSS 05	Mengelola Layanan Keamanan							
	DSS 06	Mengelola Bisnis Kontrol Proses							
Monitor Evaluate and Assess	MEA 01	Mengelola Operasi	P						P
	MEA 02	Mengelola Permintaan Layanan dan Insiden							
	MEA 03	Mengelola Permasalahan				P			P

Tabel 7: Hasil Proses Pemetaan

No	Proses COBIT 5	Keterangan
1	EDM 01	Pengaturan dan pemeliharaan kerangka tatakelola
2	EDM 02	Pengaturan dan pemeliharaan manfaat
3	EDM 03	Pencapaian optimasi resiko
4	EDM 04	Menjamin optimasi sumber daya
5	APO 02	Pengelolaan Strategi
6	APO 03	Pengelolaan enterprise architecture
7	APO 09	Pengelolaan perjanjian layanan
8	APO 11	Pengelolaan kualitas
9	APO 12	Pengelolaan resiko
10	APO 13	Pengelolaan keamanan
11	BAI 03	Pengelolaan identifikasi dan membangun solusi
12	BAI 04	Pengelolaan tatakelola ketersediaan dan kapasitas
13	BAI 09	Pencapaian pengelolaan asset
14	DSS 02	Permintaan layanan dan insiden
15	DSS 03	Pengelolaan masalah
16	DSS 04	Pengelolaan kontinuitas

Data untuk mendapatkan hasil pemetaan proses Tujuan IT dengan proses IT pada COBIT 5 didapatkan dari kuesioner pengelola layanan TI pada BDK Palembang. Hasil kuesioner pemetaan Tujuan IT – Proses IT disajikan dalam Tabel 6.

### **Proses dalam COBIT 5 hasil pemetaan Tujuan IT – Proses IT**

Dari hasil pemetaan Proses IT, penulis memilih 16 proses IT yang akan dilakukan pengukuran tingkat kapabilitasnya. Pemilihan proses IT dilakukan dengan cara observasi dan diskusi. Untuk mempermudah gambaran proses yang akan dipilih untuk dilakukan pengukuran tingkat kapabilitasnya, dapat dilihat pada Tabel 7.

## **Penutup**

Dari hasil pengukuran didapatkan 16 proses yang akan digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk mengukur kapabilitas tata kelola TI pada BDK Palembang.

## **Daftar Pustaka**

- [1] Alter Steven, "Information System: A Management Perspective", The Benjamin Cumming Publishing Company Inc.,1992.
- [2] Lucas GF., "Information Technology for Management", McGraw Hill., 2000.
- [3] Gondodiyoto, S., "Audit Sistem Informasi Lanjutan dan Pendekatan COBIT", Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007.
- [4] Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 97/PMK.01/2017 mengenai Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/page/dokumen-peraturan/0f1843d7-6a7f-4e8c-b395-db86e858c1fc>
- [5] Amhar Davi Dewantara, "Pengukuran Tingkat Kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi Berdasarkan COBIT 5 Studi Kasus Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)", Depok: Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia, 2015.
- [6] Mega Putri Islamiah, "Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) Menggunakan Framework COBIT 5 (Studi Kasus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP))", Jakarta: Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- [7] Fahmi Ajismanto, "Analisa Domain Proses COBIT Framework 5 pada Sistem Informasi Worksheet (Studi Kasus Perguruan Tinggi STMIK, Politeknik Palcomtech)", Cogito Smart Journal /Vol.3/ No.2. /Dec 2017, 2017.
- [8] Gamal Febri N, Selo dan Eko Nugroho. "Pemetaan Tujuan Kaskade COBIT 5 pada Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi di Instansi Pemerintah", Yogyakarta: Departemen Teknik Elektro dan Teknik Informasi Fakultas Teknik UGM, 2017.
- [9] Susan Sandra Indriati, "Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Berdasarkan Kerangka Kerja COBIT 5: Studi Kasus Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)", Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Magister Teknologi Informasi, 2014.
- [10] IT Governance Institute, "Framework Control Objectives Management Guidelines Maturity Models", 2007.
- [11] Mc Millan and Schumacher, "Research in Education, A Conceptual Introduction", New York: Jersey Pearson, 2003.
- [12] ISACA, "A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT", ISACA, 2012.